Penerapan ACFTA di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam

Ari Siswanto

Wartawan media cetak Nusa Bali

e-mail : arwana_87@yahoo.co.id

Abstrak

Konsep pasar bebas pertama kali dirumuskan oleh Adam Smith yang kemudian terus dikembangkan oleh David Ricardo dan Frederic Bastiat. Sebagai sebuah sistem ekonomi, pasar bebas meniscayakan akan pengurangan peran pemerintah dalam satuan ekonomi, sebab dipercaya ekonomi pasar dengan sendirinya mampu mengatur mekanismenya sendiri (invisible hand). Pasar bebas yang mengidealkan pasar berlangsung secara suka rela, bebas dari paksaan dan pencurian; ternyata pada akhirnya akan menimbulkan segudang ketimpangan (inequality). Idealisme yang dirasa sangat mulia itu ternyata sebatas utopia belaka, pasar bebas pada kenyataannya tak seindah yang dibayangkan, karena bukan kesejahteraan yang terjadi melainkan ketidakadilan yang akan timbul di sana sini. Di Indonesia, "ruh" pasar bebas yang tertuang dalam penerapan ACFTA. Apakah Indonesia siap masuk dalam arus ACFTA? Sebab, Indonesia sejatinya belum siap untuk masuk dalam arus pasar bebas (ACFTA). Andaikan siap pun Indonesia masih tak sanggup berkelit dari regulasi perdagangan bebas di bawah GATT dan WTO sendiri, yang intinya menghilangkan intervensi pemerintah dalam pasar. Dari pemahaman ini, maka menganalisis sistem ekonomi pasar bebas yang mulai berjalan di Indonesia (ACFTA) dengan kaca mata ekonomi Islam begitu sangat diperlukan mengingat masalah ekonomi terkait erat dengan pemenuhan hajat hidup seluruh

Ari Siswanto : Penerapan ACFTA di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam

umat manusia. Oleh karena itu, dari analisis dampak penerapan sistem pasar bebas didapatkan satu simpulan, bahwa pelaksanaan pasar bebas yang saat ini digelar di Indonesia (ACFTA) tidaklah relevan dengan semangat ekonomi dalam Islam itu sendiri yakni keadilan.

Kata kunci : ekonomi Islam, ACFTA, perdagangan bebas.

A. Pendahuluan

Lebih dua abad lalu Adam Smith telah menerangkan tentang keajaiban *invisible hand* dalam mengatur kegiatan suatu perekonomian. Adam Smith mengemukakan suatu pandangan yang pada hakikatnya menyatakan bahwa kegiatan dalam perekonomian tidak perlu diatur oleh pemerintah.¹ Bagi Adam Smith peran pemerintah hanya sebatas mengembangkan infrastruktur dan menjalankan administrasi pemerintahan.

Selain itu, Adam Smith meniscayakan kebebasan alami dalam ekonomi. Menurutnya kebebasan merupakan hak asasi manusia secara kodrati, karenanya tidak boleh dilanggar. Pemahaman inilah yang menjadi titik awal lahirnya paham ekonomi pasar bebas (*free trade*). Konsep pasar bebas baru dapat dikembangkan setelah terbitnya buku dari Adam Smith sendiri yang berjudul *The Wealth of Nation*, pada tahun 1776. Ajaran Adam Smith selanjutnya dikembangkan oleh David Ricardo dengan teorinya berupa “*Comparative*

¹ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi: Suatu Pengantar*, Edisi ke-III. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 394.

Advantage".²

Kecenderungan begitu kuat untuk melepaskan diri dari campur tangan pemerintah berpuncak pada abad 19 dengan munculnya zaman *laissez-faire*.³ Doktrin ini, yang artinya "biarkan kami bebas", pada intinya menghendaki campur tangan yang sekecil mungkin dari pihak pemerintah dalam urusan ekonomi, dan sepenuhnya menyerahkan keputusan-keputusan ekonomi terpenting kepada mekanisme pasar.⁴ Pada titik ini mekanisme pasar benar-benar menjadi tolok ukur bagi keberlangsungan kinerja pasar itu sendiri. *Laissez-faire* yang oleh Umar Capra disebut sebagai bentuk klasik dari kapitalisme telah mengalami modifikasi terus-menerus. Ia tetap menampilkan ciri kharismanya sebagai suatu model. Penampilannya ini bertambah kuat setelah kegagalan sosialisme.⁵

2 Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 4.

3 Kata *Laissez-faire* berasal dari bahasa Prancis dan ia pada hakikatnya berarti "biarlah mereka melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka". Maka pada hakikatnya dalam sistem *Laissez-faire* anggota masyarakat diberikan kebebasan yang sepenuh-penuhnya untuk menentukan kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan. Filsafat atau ideologi yang menjadi landasan kepada sistem ekonomi seperti ini adalah keyakinan bahwa apabila setiap unit pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan memberikan keuntungan kepada dirinya, maka pada waktu yang sama masyarakat akan memperoleh keuntungan juga. Lihat Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi: Suatu Pengantar*, Edisi ke-III, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 64.

4 Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, *Makro Ekonomi*, edisi XIV, alih bahasa Drs. Haris Munandar, dkk, Yati Sumiharti (ed), (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hlm. 42.

5 M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, alih bahasa Nurhadi Ihsan dan Rizki Amar, Cet. ke-1 (Surabaya: Risalah Gusti dan IIIT Malaysia, 1999), hlm. 19.

Seiring berkembangnya zaman liberalisme yang merupakan modifikasi dari kapitalisme terus memantapkan diri dengan mengagendakan kebebasan pasar secara tak terbatas. Seperti dikatakan Milton Friedman, bahwa kehidupan ekonomi masyarakat paling baik berlangsung tanpa campur tangan apapun dari pemerintah. Tingkat pengangguran masyarakat tidak seharusnya diatasi dengan campur tangan pemerintah, melainkan diserahkan saja kepada mekanisme pasar.⁶

Muncul sebagai wajah baru dari liberalisme adalah neoliberalisme..Paham ini mengacu pada filosofi ekonomi-politik yang mengurangi campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik. Paham ini memfokuskan pada metode pasar bebas, pembatasan yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi. Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politis, menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, dan atau intervensi pemerintah.⁷

Kemudian, prinsip perdagangan bebas (*free trade*) atau dalam lingkup yang lebih luas dalam bentuk ekonomi pasar (*free fight liberalism*) sangat didukung oleh organisasi-organisasi dunia yang *head quarter*-nya umumnya berada di Washington, seperti *Internasional Monetary Fund* (IMF) dan

6 Milton Friedman, *Capitalism and Freedom*, dikutip dari skripsi Mustakim, "Peran Pemerintah dalam Pasar Bebas (Tinjauan Hukum Islam)", skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), hlm. 3.

7 Apridar, *Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 20.

World Bank.⁸ Akibat dukungan IMF dan Bank Dunia itulah arus perdagangan bebas menjalar hampir ke seluruh belahan dunia. Akibatnya terjadi blok-blok perdagangan yang cukup signifikan seperti, AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), NAFTA (*North America Free Trade Agreement*), APEC (*Asia Pasifik Economic Cooperation*), dan Komunitas Eropa (EFTA).

Khusus di kawasan ASEAN pada tanggal 27-28 Januari 1992 di Singapura, telah ditandatangani *Agreement on Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for The ASEAN Free Trade Area* (skema CEPT untuk AFTA oleh para Menteri Ekonomi ASEAN. Produk-produk yang dimasukkan ke dalam CEPT didasarkan pada pendekatan sektoral tingkat enam digit *Harmonized* sistem (HS) serta dibebaskan dari pembatasan kuantitatif dan larangan penggunaan valuta asing.⁹

Setelah kesepakatan AFTA dibentuklah ACFTA sebagai perjanjian turunan dari ratifikasinya melalui Keppres No 48 Tahun 2004 tentang Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China. Bukan hanya itu lahirnya ACFTA juga bisa dibilang sebagai respon negara-negara ASEAN terhadap persoalan ekonomi yang semakin kompleks. Kebutuhan untuk melebarkan sayap perdagangan telah mendorong negara-negara ASEAN untuk membuka kran perdagangannya dengan

⁸ Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional: (Aspek Hukum dari WTO)*, hlm. 5.

⁹ Apridar, *Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya*, hlm. 202.

China. Namun, pertanyaannya kemudian, apakah keputusan untuk membuka kran perdagangan dengan China merupakan keputusan yang baik dan cerdas?

Di Indonesia, disepakatinya perjanjian perdagangan bebas dengan China (ACFTA) tentu akan memperburuk perekonomian Indonesia. Sebab, sepintas menurut teori perdagangan internasional, perdagangan antarnegara yang dilakukan Indonesia dengan China yang tanpa hambatan, berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesifikasi produksi komoditas yang diunggulkan masing-masing negara tersebut memang benar. Namun, persoalan yang jauh lebih urgen telah menunggu: lihat saja produsen dalam negeri yang produknya sejenis dengan produk impor China, yang dipasarkan di dalam negeri dan memiliki tingkat daya saing yang relatif kurang kompetitif akan mengalami kerugian bahkan terancam gulung tikar. Inilah yang menjadi persoalan bagi perekonomian Indonesia.

Bagaimana Islam mencermati? Dalam Islam, kebebasan ekonomi bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari setiap ikatan, melainkan adalah kebebasan yang terkendali, terkait dengan keadilan yang diwajibkan oleh Allah.¹⁰ Seperti digambarkan dalam al-Qur'an dalam surat Hūd (11) : 87.

Artinya : *“Mereka berkata: “Hai Syu'aib, Apakah sembahyangmu menyuruh kamu agar Kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak*

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafifudin dkk, Cet.ke- 1, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 381-382.

Kami atau melarang Kami memperbuat apa yang Kami kehendaki tentang harta kami. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat Penyantun lagi berakal."¹¹

Dalam hadis juga juga dijelaskan:

اتما البيع عن تراض عن محمد بن مسنن عن حماد بن عمار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

12

Artinya : "Diriwayatkan dari Muhammad bin Musanna dari Hikam bin Hazm, mereka berdua menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya jual beli itu didasarkan pada kerelaan".

Berangkat dari ayat al-Qur'an dan hadits di atas, ada dua hal penting Islam menetapkan kebebasan dalam ekonomi, yaitu: *pertama* keimanan kepada Allah dan mentauhidkannya. *Kedua*, adalah keyakinan kepada manusia.¹³ Karenanya, Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis, yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan

11 Hūd (11) : 87.

12 Abu al-Husain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim, *al-Jamī' as-Ṣaḥīḥ*, "Kitab al-Buyū'", Bab as-Ṣidq fī al-Bai' wa al-Bayān, edisi revisi (Beirut: Dār al-Fikr, t.t) V : 10 hadis dari Muhammad bin Massana, Yahya bin Sai'd, Syu'bah, Amr bin 'Ali, 'Abd ar-Rahman bin Mahdi, Qatadah, Abu al-Khalil, 'Abd Allah bin al-Haris, Hakim bin Hizam, dikutip dari skripsi Nurjanah Triastuti Rahajeng, "Pengaturan Perdagangan Jasa dalam WTO Menurut Perspektif Hukum Islam", skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

13 Yusuf Qarḍawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, hlm. 350.

mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara.¹⁴

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah bagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*Maqâsid asy-Syari'âh*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falâh*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah tayyibah*). Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan.¹⁵

Dengan demikian, sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya kepada satu kelompok saja, tetapi tersebar ke seluruh masyarakat.¹⁶ Digambarkan dalam al-Qur'an yang artinya: "*Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu*".¹⁷

Di sinilah peran pemerintah begitu sangat dibutuhkan demi stabilitas ekonomi dalam suatu negara. Pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan pasar Islami. Intervensi pemerintah dalam pasar bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi ia akan mengambil peranan besar dan penting. Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai "wasit" atas permainan pasar, tetapi ia akan berperan aktif

14 Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, jilid I (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 10.

15 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 54.

16 Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, hlm. 11.

17 Al-Hasyr (59) : 7.

bersama pelaku-pelaku pasar yang lain.¹⁸

Dengan demikian Islam tidak menolak mekanisme pasar. Islam justru membuka diri demi terciptanya keadilan sosial dan terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat. Sebagaimana dikatakan Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari “keteraturan alami”.¹⁹

Berangkat dari pemahaman di atas, Islam memandang bahwa sistem pasar dan persaingan bebas yang dipraktikkan oleh Indonesia dengan China (ACFTA) akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena fitrah manusia sebagai makhluk bebas mendukung daya kreatif dalam mengelola sumber daya ekonomi. Dengan catatan pemerintah tetap perlu memberikan intervensinya demi tercapainya keadilan sosial, sebagaimana amanat UUD 1945. Namun, pasar bebas cenderung menimbulkan setiap orang untuk mementingkan diri sendiri. Hal ini tentu dapat menimbulkan terjadinya penindasan pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah dan mengakibatkan tingkat depedensi negara atau pihak yang lemah semakin besar dan cenderung didekte dan dipaksa untuk mematuhi keinginan negara atau pihak yang kuat dengan kompensasi yang cenderung memberatkan.²⁰

18 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, hlm. 460.

19 *Ibid.*, hlm. 110.

20 Apridar, *Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya*, hlm. 65.

B. Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Syariat Islam yang berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan ummat manusia. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Jadi, tidak salah jika syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna bagi seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan di dunia ini.

Saling berinteraksi satu sama lain dalam urusan kebutuhan hidup adalah hal yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia, hal ini harus dilakukan mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Tata kelola untuk mengatur hubungan itu kemudian lahirlah apa yang kita sebut sekarang sebagai ekonomi.²¹

Adapun perjanjian luar negeri dalam bidang ekonomi, perdagangan dan keuangan maka secara umum hukumnya mubah karena masuk dalam kategori hukum sewa atas barang dan jasa (*ijârah*), jual-beli (*bai'*), dan pertukaran mata uang (*ṣarf*). Namun demikian, jika di dalam klausul perjanjian tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syara' maka tidak boleh disepakati dan ditindaklanjuti. Hal ini didasarkan pada kaidah uṣūl:

“SETIAP individu (bagian) yang masuk dalam kategori mubah jika mengantarkan pada dharar (bahaya) maka

²¹Secara garis besar, *ekonomi* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti *rumah*, dan *nomos* yang berarti *aturan*. Jadi, *ekonomi* adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat, maupun dalam rumah tangga negara.

individu (bagian) tersebut dilarang sementara individu (bagian-bagian) lain yang masuk dalam kategori tersebut tetap mubah.”²²

Karena itu, prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada beberapa aspek, antara lain:²³

1. Kebebasan individu

Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah negara Islam. Karena tanpa kebebasan tersebut individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat.

2. Hak terhadap harta

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Walaupun begitu ia memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.

3. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar

Islam mengakui ketidaksamaan ekonomi di antara orang perorang tetapi tidak membiarkannya menjadi bertambah luas, ia mencoba menjadikan perbedaan tersebut dalam batas-batas yang wajar, adil dan tidak berlebihan.

²² [Http://pondok24.wordpress.com/2010/02/15/acfta-pasar-bebas-dalam-pandangan-islam/](http://pondok24.wordpress.com/2010/02/15/acfta-pasar-bebas-dalam-pandangan-islam/). diakses tanggal 19 Desember 2010.

²³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, jilid ke-1, (Jakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 8-10.

4. Kesamaan sosial

Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi tetapi ia mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga sampai tahap bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu masyarakat saja. Di samping itu amat penting setiap individu dalam sebuah negara (Islam) mempunyai peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan pekerjaan atau menjalankan berbagai aktivitas ekonomi.

5. Jaminan sosial

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara Islam; dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Memang menjadi tugas dan tanggungjawab utama bagi sebuah negara Islam untuk menjamin setiap warga negara, dalam memenuhi kebutuhannya sesuai dengan prinsip "*hak untuk hidup*". Dan terdapat persamaan sepenuhnya di antara warga negara apabila kebutuhan pokoknya telah terpenuhi.

6. Distribusi kekayaan secara meluas

Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok kecil tertentu orang untuk menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat.

7. Larangan menumpuk kekayaan

Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan

mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang tidak baik tersebut supaya tidak terjadi dalam negara.

8. Larangan terhadap organisasi anti sosial

Sistem ekonomi Islam melarang semua praktik yang merusak dan antisosial yang terdapat dalam masyarakat, misalnya berjudi, minum arak, riba, menumpuk harta, pasar gelap dan sebagainya.

9. Kesejahteraan individu dan masyarakat

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan dengan mereka. Maka sistem ekonomi Islam mencoba meredakan konflik ini sehingga terwujud kemanfaatan berguna.

Sampai di sini, Islam mamaknai ekonomi sebagai kelurusan cara dan juga bermakna adil/keseimbangan.²⁴ Sehingga, tidak salah jika prinsip ekonomi Islam dimaksudkan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga untuk memperoleh kepuasan tidak hanya pada wilayah eksoterik (*zâhir*)

24 Islam menggunakan (*Al-qasad*) untuk menyebut ekonomi. (*Al-qasad*) yang oleh Abdullah Abul Husain at-Ṭariqi kemudian dimaknai *ekonomis* yang berarti dalam satu aktivitas merupakan lawan dari pemborosan, yaitu sikap antara perilaku konsumtif dan penghematan yang berlebihan. Sikap ekonomis berarti tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu kikir. Abdullah Abul Husain at-Ṭariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, diterjemahkan oleh M. Irfan Syofwani, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 13.

semata melainkan juga kepuasan dalam wilayah esoterik (batin).

Dalam Islam, persoalan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada kepuasan eksoterik dan esoterik itu kemudian dimaknai sebagai *falâh* (kesuksesan, kemuliaan, dan kemenangan). Dengan kata lain, dimaksudkan untuk memperoleh kelangsungan hidup abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi (bebas dari segala kebodohan).²⁵

Istilah *falâh*²⁶ menurut Islam diambil dari kata al-Qur'an, yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih ditekankan pada aspek spritual. *Falâh* berasal dari bahasa Arab dari kata kerja *aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan. Dalam pengertian literal, *falâh* adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Istilah *falâh* menurut Islam diambil dari kata al-Qur'an, yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual.²⁷ Dalam al-Qur'an Allah berfirman yang artinya : "*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah*

25 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, hlm. 2.

26 *Ibid.*, hlm. 2.

27 *Ibid.*, hlm. 2.

orang-orang yang beruntung".²⁸ Dan dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman yang artinya: "*Timbangan pada hari itu ialah kebenaran (keadilan). Maka Barangsiapa berat timbangan kebaikannya. Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung*".²⁹

Berangkat dari pemahaman teks al-Qur'an ini, ekonomi Islam yang sarat dengan muatan *Rubbaniyyah akhlak, kemanusiaan dan pertengahan*,³⁰ diharapkan dapat meraih kesempurnaan *falâh* itu. Karena, ekonomi Islam sendiri dengan seperangkat regulasinya bermaksud mengarahkan persoalan ekonomi pada wilayah yang selama ini telah ditinggalkan dalam sistem ekonomi global (kapitalisme dan sosialisme), yakni etika dan moral.

Guna mewujudkan cita-cita *falâh* tersebut, lagi-lagi pemerintah diharapkan turut andil menjadi lokomotif perubahan ke arah yang lebih baik. Sebab, Islam memandang, bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisipatif dari serangan luar. Tapi pertanggungjawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal: makmur dan adil. Keadilan dalam masyarakat, tidak mungkin tercipta, tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan pertolongan kepada mereka, juga dalam

28 Al-'Imrân (3) : 104,

29 Al-A'râf (7) : 8.

30 Yusuf Qarḍawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafifudin dkk, (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hlm. 23.

masalah yang menyangkut perekonomian.³¹

Menurut Abu Zahra, penegakan keadilan termasuk sasaran syariat Islam. Ada tiga macam sasaran syariat Islam, yaitu: *pertama*, penyucian jiwa agar tiap pribadi menjadi sumber kebaikan untuk orang lain dan bukan penderitaan. *Kedua*, menegakkan keadilan yang merata. *Ketiga*, menciptakan maslahat hakiki.³² Karenanya, ketiga hal tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Penyucian jiwa merupakan landasan awal bagi terbentuknya suatu keadilan.³³ Sedangkan keadilan merupakan prasarat bagi terciptanya masalah hakiki yang menurut Abu Zahra mengacu pada lima hal yang merupakan pilar-pilar kehidupan dunia, yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.³⁴

Hal lain yang perlu dicermati ialah dalam ekonomi Islam, ditekankan adanya dinamika vertikal dan horizontal dalam kehidupan ekonomi. Dinamika vertikal ekonomi Islam adalah transendensi pemilikan kekayaan, yang diperoleh melalui bekerja sebagai realisasi kewajiban agama, sehingga setiap pekerjaan dan usaha membangun kegiatan ekonomi selalu tidak terlepas dari dimensi moralitas dan pencarian ridla ilahi. Sedangkan dinamika horizontal adalah makna

31 M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalisme dan Sosialisme*, alih bahasa Muhadi Zainuddin, cet. III, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 54.

32 M. Abu Zahra, *Uşūl Fiqh*, alih bahasa Saifullah Ma'shum dkk, Cet. ke-VIII, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 543-548.

33 Asas-asas di mana Islam menegakkan keadilan itu adalah: (1) kebebasan jiwa yang mutlak, (2) persamaan kemanusiaan yang sempurna, (3) jaminan sosial yang kuat. Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasan Afif Mohammad, Cet. ke-I, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 43.

34 M. Abu Zahra, *Uşūl Fiqh*, hlm. 549.

sosial dalam pekerjaan dan kemajuan kegiatan usaha, baik dalam pengertian internal yaitu untuk memperluas usaha, maupun eksternal dalam kaitannya dengan kewajiban sosial kepada sesamanya.³⁵

Penekanannya bertumpu pada persoalan etika bisnis yang seharusnya menjadi acuan bagi setiap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Dalam Islam etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah, halal/haram, dalam dunia bisnis berdasarkan kepada moralitas.³⁶

Desain ini paling tidak menjadi acuan standar moral tersendiri dalam etika berperilaku, khususnya pada bisnis. Tidak salah jika kemudian Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika.³⁷ Bahkan Islam bergerak untuk menyembuhkan, lewat proses pemaduan, perpecahan antara etika dan ekonomi dewasa ini.³⁸ Selain berlandaskan etika, ekonomi Islam juga berkarakter kemanusiaan, sebab tujuan ekonomi Islam sendiri adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera.³⁹

35 Musa Asy'arie, *Islam, Etos Kerjadan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: LESFI, 1997), hlm. 68.

36 Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 70.

37 Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 51.

38 Syed Nawab Haidar Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonom: Suatu Sintesis Islami*, alih bahasa Husin Anis dan Asep Hikmat, Cet. ke-III, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 97.

39 Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, hlm. 57.

Untuk mewujudkannya sistem ekonomi Islam senantiasa berakar kuat pada empat hipotesis. *Pertama*, kegiatan ekonomi berhubungan erat, lewat kesatuan, dengan lingkungan etika manusia. *Kedua*, berdasarkan kualitas dasar kesetimbangan yang adil di antara dasar-dasar produksi, konsumsi, dan saluran distribusi. *Ketiga*, kehendak bebas, yang dijabarkan ke dalam bidang ekonomi membutuhkan perpaduan yang sesuai antara kebebasan ekonomi individu dan pengendalian oleh negara, agar mencerminkan konsep khas Islam mengenai kebebasan manusia. *Keempat*, aksioma pertanggungjawaban menuntut kebijaksanaan distribusi dan pengalihan sumber-sumber penghasilan di antara berbagai kelompok dan golongan masyarakat.⁴⁰

Penekanan terhadap pentingnya moral dan etika dalam sebuah sistem ekonomi juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam ekonomi Islam. Sehingga, ekonomi Islam yang berlandaskan etika itu kemudian dicerminkan oleh Syed Nawab Haidar Naqvi dalam empat aksioma etik, yaitu kesatuan (*tauhid*), keseimbangan/kesejajaran (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), serta tanggung jawab (*responsibility*). Yang bersama-sama membentuk perangkat yang tak dapat dikurangi.⁴¹

Implikasi konkret aksioma etik dalam ekonomi Islam, pada wilayah yang lain juga akan berdampak pada meratanya keadilan sosial dalam segala lini kehidupan ummat manusia.⁴² Kesenjangan ekonomi yang selama ini

40 Syed Nawab Haidar Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonom: Suatu Sintesis Islami*, hlm. 96.

41 *Ibid.*, hlm. 37.

42 Bagi John Rawls, meratanya keadilan sosial di sini hanya tercer-

menjadi momok dapat diminimalisasi dengan kesadaran bahwa dalam ekonomi Islam kepuasan individu dibatasi oleh kepuasan orang lain. Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman yang artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁴³

Dengan kata lain, Islam mengakui kepentingan individu dan kepentingan orang banyak selama tidak ada pertentangan antara keduanya atau selama masih mungkin mempertemukan keduanya. Buktinya, dalam soal hak milik, Islam masih mengakui hak milik individu, dan pada saat yang sama, masih mengakui hak milik orang lain.⁴⁴ Namun, keadilan tidak berarti kesamaan secara

min jika keadilan distributif bisa berjalan secara efektif. Maksudnya, merata dan adilnya distribusi barang-barang pokok kepada seluruh masyarakat tanpa mengenal kelas sosialnya. Kendati teori keadilan John Rawls lebih bersifat tentatif (harus diinterpretasikan sesuai dengan keadaan masyarakat) namun pertimbangan-pertimbangan moral tetap melandaskan nilai-nilai teori keadilannya. Dalam pandangan John Rawls prinsip keadilan diklasifikasikan menjadi dua pengertian. First: each person is to have equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similiary liberty for other. Second: social and economic in equalities are to be arranged so that they both, (a) reasonable expected to be to everyone a advantage and, (b) attached to positions and offices open to all. Pertama: Setiap orang memiliki hak sama sejauh yang dapat dicakup keseluruhan sistem kesamaan kemerdekaan fundamental yang setara bagi kemerdekaan semua warga yang lain. Kedua: ketidaksamaan-ketidaksamaan sosial dan ekonomi ditata sedemikian rupa sehingga: (a) paling menguntungkan bagi yang paling tertinggal, dan (b) posisi-posisi dan jabatan-jabatan terbuka bagi semua di bawah syarat kesamaan kesempatan yang *fair*. John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971.

43 An-Nisâ' (4) : 29.

44 Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim,

mutlak karena menyamakan antara dua hal yang berbeda seperti membedakan antara dua hal yang sama. Karena bagaimanapun, keadilan merupakan persamaan kemanusiaan yang memperhatikan keadilan pada semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomis yang luas.

Dalam pengertian yang lebih luas berarti pemberian kesempatan sepenuhnya kepada individu, lalu membiarkan mereka melakukan pekerjaan dan memperoleh imbalan dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan tujuan yang mulia.⁴⁵ Terminologi keadilan sosial sebagai prinsip ekonomi Islam, tidak lagi sekedar menjadi slogan normatif saja, melainkan telah menjadi nilai-nilai dasar semangat ekonomi Islam yang berkesinambungan. Bahkan, dalam Islam keadilan merupakan nilai paling asasi, dan sering diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan.⁴⁶

Pedoman keadilan di sini mengacu pada tiga pilar ekonomi Islam, yakni: *pertama*, kepemilikan ganda, di mana pada saat yang bersamaan, Islam menetapkan kepemilikan personal dan kepemilikan sosial. Dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan personal dan kepentingan sosial. Namun, jika terjadi kontadisi antar keduanya, Islam lebih memprioritaskan kepentingan sosial dibandingkan kepentingan individu. *Kedua*, kebebasan ekonomi yang

Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, alih bahasa Drs. H. Imam Saefudin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 36.

⁴⁵ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 37.

⁴⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, hlm. 59.

terikat, di mana limitasi kebebasan dalam ekonomi Islam dimaksudkan sebagai perwujudan aturan syariat dalam hal menggali dan menggunakan kekayaan. Sehingga, di bawah aturan syariat (naungan Islam), manusia akan merasakan tumbuhnya solidaritas terhadap orang lain dan mengarahkan kebebasannya pada arah yang terkontrol secara baik tanpa ada perasaan bahwa ada hak yang terampas. *Ketiga*, jaminan sosial, di mana hal ini dimaksudkan untuk membantu orang yang tidak memungkinkan untuk menghasilkan kekayaan secara mandiri, maka Islam menggariskan adanya jaminan sosial dan keberimbangan antar anggota masyarakat sebagai bentuk penolakan adanya kesenjangan mencolok dalam level penghasilan. Karenanya, Islam memberikan aturan tentang warisan sebagai jalan bagi pemerataan kekayaan.⁴⁷

Implikasi ekonomi Islam bukanlah ingin menciptakan persaingan dan monopoli di sana-sini dan mementingkan diri sendiri. Melainkan, ia merupakan cita-cita hakiki dan tulus guna ingin merealisasikan meratanya ekonomi di segala lini demi terwujudnya kesejahteraan hidup, dengan tujuan demi menegakkan keadilan semata-mata karena Allah SWT.

Sekarang bisa dilihat, bahwa keadilan di sini adalah keadilan yang berarti *tawazun* (keseimbangan) antara potensi individu baik moral ataupun material. Ia adalah *tawazun* antara individu dan komunitas (masyarakat). Kemudian antara satu komunitas dengan komunitas yang lain dan tidak ada jalan menuju *tawazun* ini kecuali dengan berhukum kepada syariat Allah dan kepada kitab dan hikmah yang la

47 Abdullah Abul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, alih bahasa M. Irfan Syofwani, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 33 – 40.

turunkan.⁴⁸

C. Sejarah Pasar Bebas

Berbicara mengenai masalah pasar bebas, tentu tidak bisa dilepaskan dari akar rumputnya –yakni ekonomi– yang kemudian disertai dengan munculnya pergolakan ekonomi dari beragam pemikiran (mazhab ekonomi). Pemikiran tentang ekonomi sendiri (uang, bunga, jasa tenaga kerja manusia dari perbudakan-perbudakan perdagangan) sebenarnya sudah ada pada masa Yunani kuno.⁴⁹ Misalnya dalam kitab Hammurabi dari Babilonia tahun 1700 SM. di mana masyarakat Yunani telah menjelaskan tentang rincian petunjuk-petunjuk tentang cara-cara berekonomi.

Pada masa Yunani kuno sudah ada teori dan pemikiran tentang uang, bunga, jasa tenaga kerja manusia dari perbudakan dan perdagangan. Bukti tentang itu dapat dilihat dalam buku *Republika* yang ditulis oleh Plato (427-347 SM), sekitar 400 tahun SM. Gagasan Plato tentang ekonomi timbul secara tidak sengaja dari pemikirannya tentang keadilan (*justice*) dalam sebuah negara ideal (*ideal state*). Menurut Plato, dalam sebuah negara ideal kemajuan tergantung pada pembagian kerja (*devition of labour*) yang timbul secara alamiah dalam masyarakat.⁵⁰

48 Yusuf Qardhawi, *Feran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, hlm. 396.

49 Kata “ekonomi” secara etimologi berasal dari bahasa Yunani: (*oikos*) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan (*nomos*) yang berarti peraturan, aturan, hukum. Dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga”.

50 Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Cet. ke-IV. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 12.

Hal serupa juga diikuti oleh murid Plato, yakni Aristoteles. Aristoteles adalah orang yang pertama kali memikirkan tentang transaksi ekonomi dan membedakan diantaranya antara yang bersifat "natural" atau "unnatural". Transaksi natural terkait dengan pemuasan kebutuhan dan pengumpulan kekayaan yang terbatas jumlahnya oleh tujuan yang dikehendaknya. Transaksi *unnatural* bertujuan pada pengumpulan kekayaan yang secara potensial tak terbatas. Aristoteles juga membela kepemilikan pribadi yang menurutnya akan dapat memberi peluang seseorang untuk melakukan kebijakan dan memberikan derma dan cinta sesama yang merupakan bagian dari "jalan emas" dan "kehidupan yang baik ala Aristoteles".⁵¹

Pada etape berikutnya, aliran yang menamakan dirinya merkantilisme (*mercantilism*) kemudian lahir. Merkantilisme periode awal menganggap bahwa banyaknya jumlah emas dan perak yang dimiliki merupakan ukuran kemakmuran suatu negara.⁵² Karenanya, Penemuan jalur perdagangan ke India oleh Vassco Da Gama dan Benua Amerika oleh Colombus menjadikan negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk melakukan ekspansi ke negara-negara lain yang bisa menghasilkan emas dan perak.⁵³ Aliran merkantilisme kemudian dikritik habis-habisan oleh kaum fisiokrat yang menganggap bahwa sumber kekayaan suatu

51 Apridar, *Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 5-6.

52 *Ibid.*, hlm. 16.

53 Geoge Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 22.

negara senyatanya tidak ditentukan oleh emas dan perak (sebagaimana yang telah dilakukan oleh aliran merkantilisme dengan melakukan ekspansi ke wilayah timur), melainkan ditentukan dengan kekayaan sumber daya alam negara itu sendiri. Ini yang menyebabkan aliran ini kemudian dinamai aliran *physiocratism*, penggabungan dari dua kata *physic* (alam) dan *cratain* atau *cratos* (kekuasaan), yang berarti mereka percaya pada hukum alam (*believers in the rule of nature*). Kaum fisiokrat pun percaya bahwa alam diciptakan oleh Tuhan penuh keselarasan dan keharmonisan.⁵⁴ Kaum fisiokrat juga percaya bahwa sistem perekonomian juga mirip dengan alam yang penuh harmoni. Karenanya, setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak. Bagi kaum fisiokrat negara (Pemerintah) tidak perlu campur tangan, karena alam akan mengatur semua. Inilah cikal bakal doktrin *laissez faire-laissez passer*,⁵⁵ artinya biarkan semua terjadi- biarkan semua berlalu.

Sejalan dengan kaum fisiokrat, kaum klasik pun mengamini pandangan fisiokrat tentang *laissez faire-laissez passer*. Bagi kaum klasik asas pengaturan kehidupan perekonomian didasarkan pada mekanisme pasar. Teori harga merupakan bagian sentral dari kaum klasik, dan mengajarkan bahwa proses produksi dan pembagian pendapatan ditentukan oleh mekanisme pasar. Dan dengan melalui mekanisme permintaan dan penawaran itu akan menuju kepada suatu keseimbangan (*equilibrium*). Jadi dalam susunan kehidupan ekonomi yang didasarkan atas milik perseorangan, inisiatif

54 Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, hlm. 23.

55 *Ibid.*, hlm. 23.

dan perusahaan orang-perorangan.⁵⁶

Adalah Adam Smith yang merupakan tokoh populer kaum klasik dan kemudian menyempurnakan gagasan *laissez faire-laissez passer*, dengan menekankan adanya “invisible hand” dalam mengatur pembagian sumber daya, dan oleh karenanya peran pemerintah menjadi sangat dibatasi karena akan mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Gagasan Adam Smith tersebut dinilai Sonny Keraf sebagai perwujudan kebebasan kodrati dan keadilan (setiap umat manusia), yang merupakan perwujudan hukum kodrat dalam bidang ekonomi. Dengan kata lain, kebebasan pasar terletak pada aspek moral di baliknya.⁵⁷ Hal itulah yang barangkali kalau boleh dibilang “ruh” keadilan ekonomi dalam perspektif Adam Smith.

“Ruh” keadilan dalam ekonomi itu kemudian dimaknai sebagai “utilitas”. Utilitas sebagai dasar moral pasar bebas terutama dikemukakan oleh teori utiliter mengenai pasar bebas, yaitu teori utiliter psikologis mengenai pasar bebas, dan teori utiliter fungsional mengenai pasar bebas. Teori utiliter mengenai pasar bebas, bergerak dalam wilayah mikro, yaitu teori pasar bebas dilihat dari sudut pandang hubungan antar individu pelaku bisnis. Teori ini terutama berbicara mengenai utilitas sebagai motif utama tindakan manusia dalam pertukaran ekonomi. Teori utiliter fungsional mengenai pasar bebas selalu bergerak dalam wilayah

55 <http://massofa.wordpress.com/2008/02/04/sejarah-pemilikan-ekonomi-praklasik-klasik-sosialis-danneoklasik/>, diakses tanggal 1 Desember 2010.

57 S. Sonny Keraf, *Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah: Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 198.

makro, yaitu teori pasar bebas dilihat dari sudut pandang manfaat sosial yang dicapai pasar bebas, dalam kerangka manfaat sosial sebagai standar penilaian moral.⁵⁸ Walaupun unsur utiliter cukup jelas dalam teori Smith, sesungguhnya argumen moral Smith untuk pasar bebas bukan terletak pada unsur utiliter ini. Bagi Smith, pasar bebas merupakan suatu pranata moral bukan hanya karena terbukti mendatangkan keuntungan bagi semua pihak, melainkan juga karena pasar bebas adalah sebuah sistem sosial yang memungkinkan manusia mewujudkan keuntungan-keuntungan moral tertentu secara paling baik.⁵⁹

Dalam perspektif ini kemudian dipahami, bahwa Adam Smith sangat menolak praktik monopoli, campur tangan pemerintah, dan mengharap persaingan bebas sebagai "mekanisme ideal". Dengan demikian, tidak ada yang diberi monopoli, dilindungi atau diberi hak istimewa, dan sebaliknya segalanya terbuka bagi persaingan bebas di antara semua pelaku ekonomi, pembagian kerja, pasar, dan produktivitas akan berkembang baik, dan karena itu akan mendorong kemakmuran nasional.⁶⁰

Gagasan besar kaum klasik itu kemudian mendapat momentum besar tatkala di awal-awal abad ke-16 sampai ke-19 kapitalisme mulai terinstitusi dengan baik di Eropa. Dari situlah kemudian, kapitalisme menurut Apridar sampai saat ini bercorak: *Pertama*, sebagian besar sarana produksi dan distribusi dimiliki oleh individu. *Kedua*,

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 201.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 206.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 244.

barang dan jasa diperdagangkan di pasar bebas (*free market*) yang bersifat kompetitif. Ketiga, modal kapital (baik uang maupun kekayaan lain) diinvestasikan ke dalam berbagai usaha untuk menghasilkan laba (*profit*).⁶¹ Gagasan kaum klasik yang dibungkus begitu apik oleh Adam Smith pun bukan lantas kebal dari sorotan kritik. Sorotan kritik datang dari mazhab sosialis yang dinahkodai oleh Karl Marx dan para pengikutnya, yang memandang kebalikan dari apa yang selama ini dipandang oleh kaum klasik – terlebih apa yang dipraktikkan oleh kapitalisme. Mazhab sosialis menolak gagasan “*invisible hand*”. Sebab, bagi mazhab sosialis justru negaralah yang berhak mengatur kekayaan bangsa dan kekayaan individu. Karl Marx sangat benci dengan sistem perekonomian liberal yang digagas oleh Adam Smith. Untuk menunjukkan kebenciannya, Marx menggunakan berbagai argumen untuk “membuktikan” bahwa sistem liberal/kapitalis itu buruk.⁶² Bukan hanya itu, Marx berusaha untuk meruntuhkan pandangan kaum kapitalisme-borjuis yang dinilainya sebagai bentuk penindasan terhadap kaum buruh. Kapitalisme, tegas Marx, muncul ke dunia “mengucurkan darah dan daki dari setiap pori-pori, dari ujung rambut sampai ujung kaki”.⁶³

Begitu besar dan kuat penolakan Marx terhadap aktivitas kaum borjuis yang “ruh” sistem ekonominya tak

61 Apridar, *Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya*, hlm. 18.

62 Deliarinov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, hlm. 73.

63 Marni Hugnes-Warrington, *50 Tokoh Penting dalam Sejarah*, alih bahasa Abdillah Halim, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 421.

lain dan tak bukan adalah kapitalisme. Namun, penolakan itu tidak serta merta dapat direalisasikan Marx dengan mulus. Setelah sekian lama gagasan Marx hanya menjadi “buah bibir” bagi pengikutnya karena tidak terealisasi dengan mulus, tiba-tiba gagasan besar Marx terhadap penghapusan kelas sosial yang selama ini terjadi akibat liberalisme/kapitalisme benar-benar direalisasikan oleh Lenin.⁶⁴ Sebagai orang yang begitu kukuh untuk segera merealisasikan dihapuskannya kelas sosial, Lenin telah merubah pandangan sosialisme ke arah “komunisme” yang sarat dengan perjuangan dan “revolusi”. Ditangan Lenin inilah kemudian “ruh” sosialisme terus berwujud dalam bentuk komunisme. Lenin terus berupaya untuk membawa sosialisme-komunisme dalam wilayah politik, dan berkat usahanya Partai Buruh Sosial demokrat Russia berhasil didirikan pada tahun 1998. Segera setelah itu kaum Bolshevik yang mendukung sepenuhnya usaha Lenin berupaya memperbesar pengaruhnya.⁶⁵

Upaya terus dilakukan hingga akhirnya pada tahun 1922 diumumkan undang-undang dasar baru : Russia menjadi “Uni Republik- republik Soviet Sosialis” atau “Uni Soviet”.⁶⁶ Pertarungan ideologi itu pun kemudian mengakibatkan terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat yang nota bene pro kapitalisme dengan Uni Soviet yang pro sosialisme. Akan tetapi, setelah berakhirnya

64 Jika digambarkan Karl Marx meletakkan dasar teori, sedangkan Lenin mengembangkan *praxis* yang akan merealisasikan teori itu. Lihat dalam Franz Magnis-Suseno, *Dalam Bayangan Lenin: Enam Pemikir Marxisme dari Lenin sampai Tan Malaka*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. xii.

65 *Ibid.*, hlm. 3.

66 *Ibid.*, hlm. 8.

perang dingin di tahun 1989, sekaligus menandakan kemenangan Amerika, banyak yang mengatakan hal itu merupakan tanda “kejayaan kapitalisme global”.⁶⁷ Bukan hanya itu, bahasa dan gaya politik internasional bergeser dari pokok-pokok seperti “pembendungan” dan “perang dingin” menjadi “kerjasama yang stabil” dan “persaingan damai yang berkelanjutan”.⁶⁸ Kemenangan itu pula yang menjadi titik awal liberalisasi ekonomi terlahir (neo-liberalisme) kembali setelah sebelumnya liberalisme sempat menjadi dasar bagi ekonomi negara-negara maju seperti Amerika Serikat dari periode 1800-an hingga masa kejatuhannya pada periode krisis besar (*Great Depression*) di tahun 1930. Sistem ekonomi yang menekankan pada penghapusan intervensi pemerintah ini mengalami kegagalan untuk mengatasi krisis ekonomi besar-besaran yang terjadi saat itu. Akibatnya sistem liberal “digantikan” oleh gagasan-gagasan dari John Maynard Keynes yang kemudian digunakan oleh Presiden Roosevelt dalam kebijakan *New Deal*.⁶⁹ Kebijakan itu ternyata terbukti sukses karena mampu membawa negara selamat dari bencana krisis ekonomi. Inti dari gagasannya menyebutkan tentang penggunaan *full employment* yang dijabarkan sebagai besarnya peranan buruh dalam pengembangan

67 Robert Gilpin dan Jean Millis Gilpin, *Tantangan Kapitalisme Global: Ekonomi Dunia Abad Ke-21*, alih bahasa Haris Munandar, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. XVI.

68 Juwono Sudarsono dkk, *Indonesia dalam Era Gobalisasi: Dimensi Baru Asia Pasifik Abad 21*, (Jakarta: Bank Summa, 1999), hlm. 21.

69 Sebenarnya John Maynard Keynes percaya apa yang dikemukakan oleh kamu klasik. Akan tetapi, Keynes menilai bahwa menuju keseimbangan dan *full employment* tersebut sangat panjang. Keynes pernah menulis: “dalam jangka panjang kita akan mati!” (*in the long run we're all dead!*), dikutip dari Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 73.

kapitalisme dan pentingnya peran serta pemerintah dan bank sentral dalam menciptakan lapangan kerja. Dan terbukti kebijakan ini mampu menggeser paham liberalisme untuk beberapa saat sampai munculnya kembali krisis kapitalisme yang berakibat semakin berkurangnya tingkat *profit* dan menguatnya perusahaan-perusahaan transnasional atau *Trans Nasional Corporation/Multi Nasional Corporation (TNC/MNC)*⁷⁰.

Kini era globalisasi⁷¹ yang semakin kuat mengakar di masing-masing tubuh setiap negara di dunia, sekaligus menandakan kejayaan kapitalisme. Hilangnya sekat-sekat antar negara sebagai upaya turut sertanya ke dalam percaturan dunia global (dunia liberal) menandakan iklim perdagangan dunia terus merangkak naik. Cita-cita untuk terus mengoptimalkan perdagangan bebas (*free trade*) terus disuarakan di seluruh dunia. Kuatnya arus globalisasi berdampak pula semakin kuatnya tekanan politik multilateral, melalui berbagai kartel pengelolaan perdagangan seperti WTO dan Bank Dunia mengakibatkan berkurangnya wewenang pemerintahan

70 http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_bebas, diakses tanggal 1 Desember 2010.

71 Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Globalisasi adalah suatu proses di mana antarindividu, antarkelompok, dan antarnegara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara. Lihat dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>, diakses tanggal 3 Desember 2010.

sampai titik minimum.⁷² Dari situlah kemudian neo-liberalisme terlahir. Satu kelebihan neo-liberalisme adalah menawarkan pemikiran politik yang sederhana, menawarkan penyederhanaan politik sehingga pada titik tertentu politik tidak lagi mempunyai makna selain apa yang ditentukan oleh pasar dan pengusaha. Dalam pemikiran neo-liberalisme, politik adalah keputusan-keputusan yang menawarkan nilai-nilai, sedangkan secara bersamaan neo-liberalisme menganggap hanya satu cara rasional untuk mengukur nilai, yaitu pasar. Semua pemikiran di luar rel pasar dianggap salah. Kapitalisme neo-liberal menganggap wilayah politik adalah tempat di mana pasar berkuasa, ditambah dengan konsep global dengan perdagangan bebas sebagai cara untuk perluasan pasar melalui WTO, akhirnya kerap dianggap sebagai neo-imperialisme.⁷³

D. Analisis Penerapan ACFTA di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam

Bagi Indonesia, disepakatinya perjanjian perdagangan bebas dengan China akan memperburuk perekonomian Indonesia. Sepintas menurut teori perdagangan internasional, perdagangan antar negara yang dilakukan Indonesia dengan China, yang tanpa hambatan, berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesifikasi produksi komoditas yang diunggulkan masing-masing negara tersebut. Namun, produsen dalam negeri yang produknya sejenis dengan produk impor China, yang dipasarkan di dalam

⁷² Apridar, *Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya*, hlm. 20.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 24.

negeri dan memiliki tingkat daya saing yang relatif kurang kompetitif akan mengalami kerugian bahkan terancam gulung tikar. Inilah yang menjadi persoalan bagi perekonomian Indonesia.

Potensi kerugian yang dialami industri manufaktur nasional sebagai dampak dari implementasi perjanjian *Asean-China Free Trade Agreement* (ACFTA) diperkirakan mencapai Rp.35 triliun per tahun. Nilai yang sangat besar tersebut hanyalah potensi kerugian yang bakal diderita oleh tujuh sektor manufaktur yakni industri petrokimia, pertekstilan, alas kaki dan barang dari kulit, elektronik, keramik, makanan dan minuman, serta besi dan baja. Perkiraan potensi kerugian tersebut merupakan hasil kajian Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).⁷⁴

Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, peran industri pengolahan mengalami penurunan dari 28,1% pada 2004 menjadi 27,9% pada 2008. Diproyeksikan 5 tahun ke depan penanaman modal di sektor industri pengolahan mengalami penurunan US\$ 5 miliar yang sebagian besar dipicu oleh penutupan sentra-sentra usaha strategis IKM (industri kecil menengah). Jumlah IKM yang terdaftar pada Kementerian Perindustrian tahun 2008 mencapai 16.806 dengan skala modal Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar. Dari jumlah tersebut, 85% diantaranya akan mengalami kesulitan dalam menghadapi persaingan dengan produk dari China.⁷⁵

⁷⁴ *Potensi kerugian akibat ACFTA capai Rp 35 triliun*, Bisnis Indonesia, 23 Desember 2009, dalam <http://bataviase.co.id/detailberita-10434874.html>, diakses tanggal 12 Desember 2010.

⁷⁵ *ACFTA-Pasar Bebas 2010: Bunuh Diri Ekonomi In-*

Belum lagi, ada sekitar 18.773 UMKM yang juga akan terancam tutup. Padahal jumlah UMKM di Indonesia 99,1% dari keseluruhan perusahaan, 98% UMKM berada di sektor mikro dan kecil. Perusahaan skala mikro ini kebanyakan bergerak di sektor perdagangan, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.⁷⁶ Ini menjadi bukti betapa sebenarnya Indonesia belum siap menghadapi panasnya suhu perdagangan bebas (ACFTA).⁷⁷

Bahkan dalam laporan *Global Competitiveness Index* (GCI) 2009 – 2010, peringkat Indonesia naik menjadi 54 dari posisi 55 pada GCI 2008 – 2009. Sementara, Malaysia berada di peringkat 24, Singapura 3, Thailand 36, China 29. Dibandingkan dengan sesama negara ASEAN, daya saing kita relatif rendah. Rendahnya daya saing tidak terjadi seketika, melainkan merupakan hasil dari evolusi kebijakan industrial yang diambil oleh pemerintah sejak dulu. Dalam *Global Competitiveness Report* 2009 – 2010 tersebut dijelaskan bahwa ada tiga hal utama kelemahan perekonomian Indonesia. *Pertama*, buruknya infrastruktur (peringkat 84)

donesia", *Bisnis Indonesia*, 9/1/2010, dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/2010/01/12/acfta-pasar-bebas-2010-bunuh-diri-ekonomi-Indonesia>, diakses tanggal 12 Desember 2010.

76 [Http://www.tamzis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=9](http://www.tamzis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=9), diakses tanggal 12 Desember 2010.

77 Ketidaksiapan pemerintah untuk menerapkan pasar bebas di Indonesia (ACFTA) bukan berarti Indonesia sama sekali tidak boleh masuk dalam arus perdagangan bebas. Indonesia bisa masuk dalam percaturan perdagangan bebas setelah pondasi ekonomi tidak lagi bergantung dan mengandalkan pada ekonomi domestik (yang bersifat konsumtif) belaka. Ini artinya ekonomi industrial harus benar-benar dikembangkan (usaha kecil dan menengah didorong untuk memajukan industrinya), barulah setelah semuanya kuat Indonesia bisa leluasa masuk dalam percaturan perdagangan bebas, dan bisa bersaing dengan produsen-produsen luar negeri.

terutama pelabuhan (peringkat 95) dan jalan (peringkat 94).

Kedua, rendahnya kesehatan masyarakat, ditandai masih banyaknya penyakit TBC dan malaria, serta masih tingginya angka kematian bayi. *Ketiga*, kesiapan teknologi (peringkat 88). Bahkan, laporan *Global Competitiveness Index (GCI) 2009-2010* yang menempatkan Indonesia peringkat 55, lebih buruk dari negara-negara ASEAN lainnya merupakan bukti konkret betapa kebijakan pelaksanaan pasar bebas di Indonesia sangat tidak pas (atau belum siap) dan terkesan tergesa-gesa. Sehingga hal itu akan menyebabkan ketimpangan ekonomi di segala lini.

Potensi kerugian yang cukup besar itu setidaknya menjadi tolok ukur bahwa sebenarnya Indonesia belum siap untuk membuka pasarnya ke arus perdagangan bebas (masuk dalam ACFTA), yang tanpa intervensi pemerintah di dalamnya. Padahal, Islam memang menghendaki kebebasan pasar, namun kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari setiap ikatan, melainkan adalah kebebasan yang terkendali, terkait dengan keadilan yang diwajibkan oleh Allah.⁷⁸ Seperti digambarkan dalam A-Qur'an surat Hūd (11) : 87.

Ayat di atas secara jelas menyatakan bahwa Islam menetapkan kebebasan dalam ekonomi. Menurut Yusuf Qardhawi ada dua hal penting Islam menetapkan kebebasan dalam ekonomi itu, yaitu: *pertama* keimanan kepada Allah dan mentauhidkan-Nya. *Kedua*, adalah

⁷⁸ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, 381-382.

keyakinan kepada manusia.⁷⁹ Karenanya, Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan, tidak pula dari sudut pandang komunis, yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara.⁸⁰

Akan tetapi Islam memandang persoalan ekonomi sebagai persoalan kepentingan individu (personal) namun tetap dalam koridor-koridor hukum Islam, dan tanpa merusak tatanan kesejarheraan dan keadilan dalam masyarakat (komunal). Bahkan, Monzer Kahf berpandangan, bahwa kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam struktur pasar Islami. Sebab, sepanjang sejarah umat Islam, kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukumnya. Nabi Muhammad SAW pun tidak bersedia menetapkan harga-harga walaupun pada saat harga membumbung tinggi. Dan selama berabad-abad dalam sejarah Islam, umat Islam tetap mempertahankan prinsip kebebasan itu.⁸¹ Kini tinggal menunggu waktu, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an yang artinya: "*Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran*

79 *Ibid.*, hlm. 350.

80 Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, alih bahasa Soeroyo, Nastangin, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm.10.

81 Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 66-69.

dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran".⁸²

Seandainya masa (*aṣr*) itu diartikan masa berlakunya ACFTA, maka dalam masa ini manusia yang tidak merugi adalah yang memenuhi empat hal: pertama, landasan seperitual. *Kedua*, wujud prestasi berupa amal saleh. *Ketiga*, berada dalam kebenaran. *Keempat*, saling *check-and-recheck*, saling mengkritik yang konstruktif dan saling memberi informasi dan saling mengingatkan.⁸³

E. Peran Pemerintah dalam Ekonomi Islam

Berlakunya perjanjian ACFTA yang resmi dimulai pada tanggal 1 Januari 2010 lalu, telah menimbulkan banyak persoalan. Hasil yang selalu disuarakan pemerintah, bahwa disepakatinya ACFTA akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ternyata hanya isapan jempol belaka. Diterapkannya ACFTA di Indonesia jelas bertentangan dengan Islam, sebab: *pertama*, dihilangkannya peran negara dan pemerintah di tengah-tengah masyarakat, yang nota bene harus berperan dan bertanggung jawab terhadap seluruh urusan rakyatnya. Padahal dengan tegas Rasulullah SAW. bersabda: *Pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan mereka (HR Muslim)*. *Kedua*, perdagangan bebas, dimana seluruh pemain dunia, bisa bermain di dalam pasar domestik tanpa hambatan, tanpa lagi dilihat apakah pemain tersebut berasal

⁸² Al-‘Aṣr (103) : 1-3.

⁸³ A. Qadri Azizy, *Melawan Globalisasi Reinterpretasi Ajaran Islam: Persiapan SDM dan Tercapainya Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 62.

dari *Dar al-Harb Fi'lan* atau tidak, juga jelas bertentangan dengan Islam. Ketiga, perdagangan bebas, dari aspek kebebasan masuknya investasi dan dominasi asing di dalam pasar domestik, jelas menjadi sarana penjajahan yang paling efektif, dan membahayakan perekonomian negeri ini.⁸⁴

Padahal dalam sejarah Islam, kendati Nabi Muhammad SAW menghendaki kebebasan pasar, bukan berarti pasar dibiarkan berjalan sesuai mekanismenya kendati harus menggosok kepentingan orang lain. Karena itu, *Al-Hisbah* pengawas pasar (*market controller*), didirikan oleh nabi sebagai media kontrol agar pasar tidak berjalan semaunya sendiri dan merugikan orang lain.

Berkaca pada apa yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW terkait upayanya untuk tetap memposisikan pasar sebagai sesuatu yang *sunnatullah* (berjalan alamiah), namun tetap pada koridor-koridor keadilan, seharusnya juga dilakukan era modern seperti sekarang ini, di mana negara (dalam hal ini pemerintah) juga dituntut untuk bertindak *al-Hisbah* atau pengawas pasar (*market controller*), sebagaimana di masa nabi dahulu. Hal itu mutlak dilakukan, sebab menurut Azhar Basyri, pemerintah (penguasa) merupakan sendi sistem ekonomi (menurut perspektif Islam), yang bertugas menegakkan nilai-nilai keadilan, melindungi kepentingan perseorangan dan masyarakat serta menjamin terwujudnya keseimbangan dan kecukupan dalam kehidupan masyarakat.⁸⁵

⁸⁴ Hidayatullah Muttaqin, *jurnal-ekonomi.org*, 10/1/2010, diakses tanggal 19 Desember 2010.

⁸⁵ Ahmad Azhari Basyri, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, cet III

M. Faruk an-Nabahan, bahkan menjelaskan bahwa tanggung jawab pemerintah bukan sebatas pada soal keamanan semata, tapi pertanggungjawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal: makmur dan adil. Karena itu, keadilan dalam masyarakat tidak mungkin tercipta tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan pertolongan kepada mereka, juga dalam masalah yang menyangkut perekonomian.⁸⁶

David C. Korten dalam *The Post-Corporate World: Life After Capitalism* (1999) dan Joseph E. Stiglitz dalam *Globalization and Its Discontents* (2002), mengemukakan bahwa pasar yang berhasil mensyaratkan adanya keseimbangan peran antara pemerintah dan pasar. Keseimbangan tersebut mungkin berbeda dari satu negara dengan negara lain dan dari waktu ke waktu, juga antara satu sektor dengan sektor lainnya, serta dari satu masalah dengan masalah lain. Tercapainya keseimbangan itu mensyaratkan adanya kejelasan mengenai apa yang harus dilakukan oleh masing-masing dan bagaimana cara melakukannya. Intervensi pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan publik juga diperhatikan. Namun, keadaan sebaliknya terjadi pada saat ini. Era ekonomi baru dengan rezim perdagangan bebas, mengharuskan minimalisasi peran pemerintah suatu negara dalam mengatur perekonomian suatu negara. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang ikut campur dalam perekonomian

(Yogyakarta: BPEE, 1987), hlm. 43.

⁸⁶ M. Faruk an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasan Muhadi Zainudin, cet. III, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 54.

dianggap telah menghambat pasar bahkan laju perekonomian. Dengan demikian, deregulasi dianggap sebuah kewajiban bagi rezim perdagangan bebas.⁸⁷ Oleh karena itu, peran pemerintah begitu besar dalam upaya memajukan ekonomi suatu negara, sebagaimana diamanatkan sila ke-5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara garis besar peran pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi: *pertama*, upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan, yakni mencapai *falâh* yang direalisasikan melalui optimasi *maşlahah*, dengan kata lain peranan pemerintah itu adalah menciptakan ke-*maşlahah*-an bagi seluruh masyarakat. *Kedua*, upaya mewujudkan konsep pasar yang islami, artinya peranan pemerintah dalam mengintervensi pasar bukan hanya sekedar temporer dan minor, melainkan ia akan mengambil peranan yang besar dan penting. Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai “wasit” atas permainan pasar, tetapi ia akan berperan aktif bersama pelaku-pelaku pasar yang lain (*co-existing*).⁸⁸

Selain itu, peran pemerintah yang tak kalah pentingnya ialah: *pertama*, manajemen kekayaan publik dalam rangka memaksimalkan kepentingan publik. *Kedua*, pemenuhan segala persyaratan untuk membangun negara yang secara efektif dapat melindungi masyarakat dan kepentingan budaya, ekonomi, religius, dan politik. *Ketiga*, menggali pemasukan untuk membiayai administrasi publik dan tugas-

87 [Http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&dn=2007123154331](http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&dn=2007123154331), diakses tanggal 19 Desember 2010.

88 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 459-460.

tugas pemerintah. *Keempat*, menjamin para individu agar dapat meningkatkan efisiensi dan derajat kekayaan dan kesejahteraannya. *Kelima*, menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, khususnya dalam distribusi dan redistribusi kekayaan/pendapatan. *Keenam*, melindungi ekonomi agar tetap sesuai dengan nilai dan prinsip Islam.⁸⁹

Bagaimana dengan Indonesia saat ini, yang menyerahkan sepenuhnya mekanisme pasar pada pasar (ACFTA)? Ini yang patut menjadi perhatian, seharusnya pemerintah Indonesia bersedia mempraktikkan apa yang sudah Nabi Muhammad SAW lakukan di masanya, menghendaki kebebasan pasar namun tetap mengontrol pasar. Itu hanya mungkin dilakukan jika pemerintah mampu memberikan regulasi yang jelas, tidak merugikan para pelaku pasar (perusahaan/distributor) dan juga kepentingan-kepentingan di luar pelaku pasar (konsumen).

Ada memang regulasi yang dikeluarkan pemerintah demi menciptakan pasar sesuai mekanismenya sendiri; ini bisa dilihat dalam bentuk undang-undang anti monopoli, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, undang-undang ini tidak akan mampu “membendung” arus perdagangan bebas (ACFTA) yang saat ini sedang berjalan. Sebab, ruang gerak undang-undang ini begitu sangat terbatas. Undang-undang ini hanya mengatur larangan suatu perusahaan menguasai atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 460.

tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.⁹⁰ Bahkan dalam pasal 1 (b, c, d, e, f) tidak berisi keterkaitannya dengan praktik pasar bebas (dalam hal ini ACFTA). Di mana negara-negara ASEAN dan China bebas saling mengeksport produksinya. Sehingga apa yang terjadi, undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sama sekali tidak akan mampu menyelesaikan persoalan peliknya penerapan ACFTA. Karena pada kenyataannya berbicara ACFTA berarti berbicara bagaimana kemudian negara menjamin perusahaan-perusahaan kecil yang ada di dalam negeri bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri, terlebih agar tidak tergilas oleh masuknya barang-barang dari luar yang secara kualitas jauh lebih tinggi. Dan jaminan itu tidak ada dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh karena itu, setidaknya ada dua hal penting yang harus pemerintah lakukan, yaitu: *pertama*, dalam kehidupan masyarakat industri pemerintah mengambil peran sebagai pengatur jalannya perekonomian. Kegiatan-kegiatan pengaturan tersebut meliputi upaya-upaya untuk merangsang produksi, pengurangan angka pengangguran, dan menciptakan stabilitas harga.

Untuk mencapai sasaran ini pemerintah dapat menggunakan kebijakan pengendalian *langsung* dan atau pengendalian *tidak langsung*. Pengendalian langsung adalah usaha untuk pemerintah untuk mencegah beberapa kegiatan ekonomi tertentu, dengan cara mengeluarkan undang-undang atau peraturan-peraturan khusus. Sedangkan pengendalian tidak langsung adalah kebijakan yang secara langsung

⁹⁰ Lihat UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 1 (a).

tidak dapat dirasakan oleh para pelaku pasar, termasuk tingkat keuntungan dan upah pekerja. Kebijakan fiskal dan keuangan merupakan tipe pengendalian tidak langsung yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna mengatur perekonomian pasar. *Kedua*, yang dimaksud dengan redistribusi pendapatan adalah upaya pemerintah untuk mengendalikan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Pemerintah dapat membuat beberapa kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini melalui; pajak, zakat, langkah-langkah untuk menjamin kesejahteraan dan jaminan sosial, pemberian subsidi-subsidi secara langsung dan bahkan kebijakan-kebijakan yang menyebabkan inflasi.⁹¹

Dengan demikian, melihat beberapa catatan dampak negatif yang bisa ditimbulkan akibat penerapan ACFTA di Indonesia, sudah menjadi keharusan pemerintah Indonesia tetap bisa mengintervensi pasar, tentunya dengan beberapa catatan, sebagaimana yang telah diungkap di atas. Ini semata-mata demi menjaga stabilitas ekonomi yang dikhawatirkan runtuh akibat terlanjur masuk dalam perdagangan bebas itu. Karena bagaimana pun, upaya untuk menyelamatkan perekonomian (dalam hal ini perekonomian yang berketidakadilan dan tidak menyejahterakan ummat) juga pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan membentuk *Al-hisbah* pengawas pasar (*market controller*).

Bagi Islam intervensi memang “haram”, karena akan melanggar hak asasi dan memasung individu untuk berkreasi, namun pada kasus tertentu tindakan intervensi tetap harus

⁹¹ Abdul Mujib, “Negara dan Aktifitas Ekonomi dalam Islam”, *Ek-bisi*, Vol. 1, No. 1, Desember 2006, hlm. 63.

diambil demi kemaslahatan yang lebih besar. Seperti dikatakan M. Faruk an-Nabahan, dalam kasus tertentu Islam mengesahkan intervensi, tapi diperlukan berbagai syarat dan catatan yang ketat, yang mengacu ke landasan valid: demi kesejahteraan umum yang terancam andaikata intervensi tidak dilakukan.⁹²

F. Kesimpulan

Pada ini dunia berada pada genggaman globalisasi, yang menghilangkan sekat-sekat masing-masing negara. Perdagangan bebas yang tanpa hambatan pun saat ini semakin merajalela, *entah* apakah hal itu akan berdampak positif atau negatif. Dan sejatinya, Indonesia dalam hal ini belum siap untuk masuk dalam ACFTA. Andaikan siap pun Indonesia masih tak sanggup berkelit dari regulasi perdagangan bebas, yang intinya menghilangkan intervensi pemerintah dalam pasar. Kini nasi sudah menjadi bubur. Indonesia mau tidak mau harus masuk dalam kubangan arus perdagangan bebas (ACFTA). Dan itu berarti Indonesia harus benar-benar siap menerima segala resiko yang mungkin terjadi. Hilangnya peran pemerintah dalam perdagangan bebas (ACFTA) tentu sangat bertentangan dengan Islam. Bagi Islam sendiri memang menghendaki kebebasan pasar, namun bukan berarti kebebasannya mutlak tanpa ikatan. Tetapi ia adalah kebebasan yang terkendali, terikat dengan "keadilan" yang diwajibkan Allah SWT, sebagaimana tercermin dalam firman Allah SWT Surat Hüd (11): 87.

⁹² M. Faruk an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, hlm. 122.

Daftar Pustaka

- Al Kaaf, Zaky, Abdullah. *Ekonomi dalam Persepektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Al-Assal, Muhammad, Ahmad dan Karim, Abdul, Ahmad, Fathi. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa Drs. H. Imam Saefudin. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- An-Nabahan, M. Faruq. *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Kapitalisme dan Sosialisme*, alih bahasa Muhadi Zainuddin, Cet. ke-III. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Asy'arie, Musa. *Islam, Etos Kerjadan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: LESFI, 1997.
- At-Tariqi, Husain, Abul, Abdullah. *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, alih bahasa M. Irfan Syofwani. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Adisumarta, R. J. Kaptin. *Komentar Peristiwa Ekonomi 1965-1969*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Amin, Munir, Samsul. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Apridar, *Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Armstrong, Karen. *Islam Sejarah Singkat*, alih bahasa Funky Kusnaendy Timur, Cet. ke-V. Yogyakarta: Jendela, 2005.
- Azizy, A. Qadri. *Melawan Globalisasi Reinterpretasi Ajaran Islam: Persiapan SDM dan Tercapainya Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Badroen, Faisal dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Ari Siswanto : *Penerapan ACFTA di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam*
- Basyri, Azhari, Ahmad. *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Cet. ke-III. Yogyakarta: BPEE, 1987.
- Budiarto, Teguh dan Ciptono, Fandy. *Pemasaran Internasional*. Yogyakarta: BPFE, 1997.
- Chapra, M. Umer. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Debroy, Bibek. *Buku Panduan Transformasi ke Perekonomian Pasar*, alih bahasa Sukasah Syahdan, Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Indonesia, 2008.
- Deliarnov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Cet. ke-IV. Jakarta: PT RajaGrasindo Persada, 2005.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 1990.
- Fuady, Munir. *Hukum Dagang Internasional: Aspek Hukum dari WTO*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Jusmaliani. *Kebijakan Skonomi Dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam*, alih bahasa Machnun Husein. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991.
- Karim, Adiwarmam. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi ke-III. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Karim, Adiwarmam. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2001.
- Karim, Adiwarmam. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Naqvi, Haidar, Syed. Nawab. *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*, alih bahasa M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, cet. III. Bandung: Mizan, 1993.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian*

Islam, alih bahasa Mahbub Haris dan Willy Abdul Qohar. Jakarta: Rabbani Press, 1997.

Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, alih bahasa Soeroyo, Nastangin. Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Zahra, M. Abu. *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saifullah Ma'shum dkk, cet. VIII, Jakarta: Pustaka Firdaus. 2003.

<http://pondok24.wordpress.com/2010/02/15/acfta-pasar-bebas-dalam-pandangan-islam/>, diakses tanggal 19 Desember 2010.

http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_bebas, diakses tanggal 1 Desember 2010.

ACFTA-Pasar Bebas 2010: Bunuh Diri Ekonomi Indonesia. *Bisnis Indonesia*, 9/1/2010, dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/2010/01/12/acfta-pasar-bebas-2010-bunuh-diri-ekonomi-Indonesia>, diakses tanggal 12 Desember 2010.

<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&dn=20071203154331>, diakses tanggal 19 Desember 2010.

http://www.tamzis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=9, diakses tanggal 12 Desember 2010.

ACFTA-Pasar Bebas 2010: Bunuh Diri Ekonomi Indonesia". *Bisnis Indonesia*, 9/1/2010, dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/2010/01/12/acfta-pasar-bebas-2010-bunuh-diri-ekonomi-Indonesia>, diakses tanggal 12 Desember 2010.

http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_bebas, diakses tanggal 1 Desember 2010.

<http://massofa.wordpress.com/2008/02/04/sejarah-pemikiran->